



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online*

SUBJEK

EKONOMI

Rabu, 2 Agustus 2023

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN**  
**Perpustakaan**  
**2023**

## **Daftar Isi**

1. STABILITAS RUPIAH TERJAGA – *Media Online Kompas*
2. PANTANG KENDUR KENDALI INFLASI – *Media Online Bisnis Indonesia*
3. MALAYSIA SIAP MASUK SEKUPANG – *Media Online Bisnis Indonesia*
4. LAJU RUPIAH MENANTI EFEK DHE – *Media Online Bisnis Indonesia*
5. MEMBIDIK RPJPN 2025 – 2045: PERSPEKTIF EKONOMI – *Media Online Media Indonesia*
6. MEKANISME HEDGING & TRANSFORMASI HIJAU – *Media Online Kontan*

## Stabilitas Rupiah Terjaga

Stabilitas rupiah ditopang oleh kinerja pasar surat utang negara yang kuat dan kewajiban parkir devisa hasil ekspor sumber daya alam yang mulai diterapkan bulan ini.

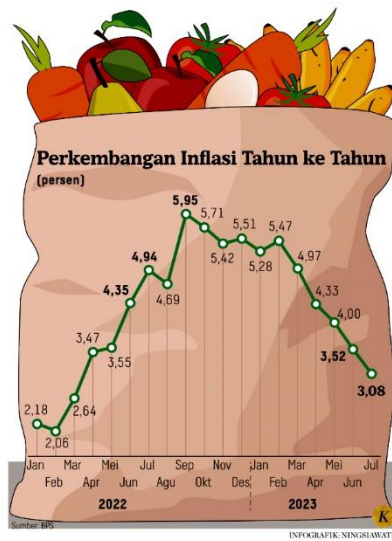
**JAKARTA, KOMPAS** — Kebijakan pengetatan moneter yang berlanjut di sejumlah negara maju sejauh ini dinilai tidak berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Rupiah diyakini bakal konsisten menguat ditopang oleh kinerja pasar surat utang negara yang stabil dan kewajiban parkir devisa hasil ekspor sumber daya alam yang mulai diterapkan bulan ini.

Sampai 28 Juli 2023, nilai tukar rupiah tercatat menguat 313 persen secara tahun kalender (*year to date*) atau sejak akhir Desember 2022.

Penguatan nilai tukar rupiah itu terjadi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dan berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Pekan lalu, bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), baru saja menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak 25 basis poin hingga mencapai 5,25-5,5 persen, tertinggi dalam dua dekade.

The Fed diperkirakan masih akan menaikkan lagi suku bunga acuannya sebanyak satu kali pada September 2023 hingga menyentuh level 5,75 persen. Pengetatan moneter itu seiring dengan tekanan inflasi di negara maju yang masih relatif tinggi. Proyeksi inflasi global masih diliputi ketidakpastian seiring dengan adanya potensi kenaikan inflasi pangan dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini, meski di tengah tekanan inflasi global, nilai tukar rupiah akan konsisten menguat dengan ditopang oleh indikator fundamental ekonomi yang kuat, imbal hasil surat berharga negara (SBN) yang menarik, serta kebijakan wajib parkir devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang berlaku mulai bulan ini.

"Nilai tukar rupiah akan tetap terkendali untuk mendukung stabilitas perekonomian,"



kata Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) triwulan II tahun 2023 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Ia memaparkan, likuiditas valuta asing (valas) di dalam negeri masih akan terjaga berkat kinerja SBN yang menguat. Per 28 Juli 2023, imbal hasil (*yield*) SBN Indonesia seri *benchmark* 10 tahun menguat 66 basis poin secara tahun kalender menuju level 6,28 persen. Ketersediaan valas yang stabil di dalam negeri membuat stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tetap terjaga.

Penguatan kinerja pasar surat utang negara itu didukung oleh laju inflasi Indonesia yang masih terkendali sesuai kisaran target 3 persen plus minus 1 persen atau 2-4 persen. Badan Pusat Statistik mencatat, per Juli 2023, inflasi secara tahunan melandai ke 3,08 persen.

Di sisi lain, kondisi perekonomian dan kinerja APBN yang terjaga juga membuat investor masih yakin menanamkan modal di pasar surat utang RI. Per akhir Juli 2023, aliran modal asing yang masuk ke pasar SBN mencapai Rp 91,86 triliun secara tahun kalender.

"Ini tandanya investor, terutama investor asing, masih

memiliki *confidence* pada pasar SBN kita. Ini terjadi di tengah volatilitas pasar keuangan global dan kenaikan suku bunga FFR yang luar biasa tinggi," kata Sri Mulyani.

### Ditopang DHE

Rupiah juga diyakini menguat seiring dengan kebijakan wajib parkir 30 persen DHE SDA yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2023. Gubernur Bank Indonesia Perry Wariyo memperkirakan, potensi devisa dari kebijakan itu sekitar 8 miliar dollar AS sampai 9 miliar dollar AS per bulan.

Estimasi BI, jika tingkat kepatuhan eksportir 90 persen, tambahan cadangan devisa yang bisa ditarik negara 92 miliar dollar AS per bulan. Jika tingkat kepatuhan 75 persen, devisa yang dikantongi 8 miliar dollar AS per bulan. Sementara jika tingkat kepatuhan 50 persen, tambahan likuiditas valas yang bisa didapat setiap bulan adalah 5 miliar dollar AS.

Perhitungan BI itu berbeda tipis dengan Kementerian Keuangan yang memperkirakan tambahan cadangan devisa per bulan dari kebijakan DHE SDA adalah 10 miliar dollar AS hingga 12 miliar dollar AS. Angka itu didapat dari potensi ekspor SDA dengan nilai per dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) di atas 250.000 dollar AS senilai total 164 miliar dollar AS.

Menurut Perry, potensi dari kebijakan wajib parkir DHE SDA itu diperkirakan baru mulai terasa pada Desember 2023. Semakin banyak valas yang berputar di dalam negeri, nilai tukar rupiah diyakini akan tetap kuat meskipun ada gejolak di sistem keuangan global.

Untuk memastikan tingkat kepatuhan pengusaha tinggi, pemerintah mempertimbangkan menambah insentif bagi eksportir. Sri Mulyani menga-

takan, setelah beraudiensi dengan pelaku usaha SDA, Senin (31/7), pemerintah akan mengkaji opsi fasilitas dan insentif tambahan.

"Contohnya, kalau ada pengusaha yang butuh DHE untuk modal kerja, kita akan lihat apakah bisa ada insentif tambahan. Selama enam bulan ke depan ini akan kita observasi bersama supaya kebijakan ini bisa lebih menarik bagi eksportir," katanya.

Terkait dampak kebijakan DHE SDA, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardele menilai, kebijakan itu bukan satu-satunya senjata untuk menguatkan rupiah. Meski demikian, tambahan suplai valas dari kebijakan itu bisa menekan potensi pelemahan nilai tukar. "Kalau likuiditas valas meningkat dan rupiah lebih stabil, sektor usaha juga pasti akan diuntungkan," ujarnya. (AGE)

# Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

RABU, 2 AGUSTUS 2023

**G**erak inflasi yang makin ramah menjadi bukti ketajaman taji otoritas fiskal dan moneter dalam menangkalkan momok indeks harga konsumen (IHK) yang menghantui ekonomi nasional sejak penjujungan tahun lalu.

Kemarin, Selasa (1/8), Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan inflasi IHK pada Juli 2023 hanya 3,08% (year-on-year/YoY), alias berada di jalur alamiah yang sempat ditinggalkan sejak kuartal III/2022.

Akan tetapi, bukan berarti tugas pengendalian inflasi ke depan bakal semakin enteng. Pemangku kebijakan tak boleh jemawa, mengingat tantangan yang dihadapi masih cukup berat, terutama yang bersumber dari eksternal, yakni penguatan dolar Amerika Serikat (AS).

Musababnya, kondisi itu mendorong peningkatan inflasi atas barang impor yang masuk ke dalam komponen ongkos produksi sehingga tertransmisi ke harga jual di tingkat konsumen yang terus merangkak.

Kewaspadaan itu pun bukan omong kosong belaka. Menilik laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia memang membaik pada bulan lalu, dari 52,5 menjadi 53,3.

Namun, ongkos yang dikeluarkan pelaku usaha untuk mendatangkan bahan baku terpantau lebih mahal sehingga mendorong naiknya biaya operasional. Tak pelak, produsen pun melimpahkan kenaikan itu ke konsumen.

Dunia usaha pun mengingatkan kepada pemerintah untuk memantau dan menyiapkan mitigasi risiko dalam rangka menangkalkan lesatan inflasi IHK yang terdorong oleh naiknya inflasi barang impor.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang, mengatakan pemerintah patut waspada di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih tak menentu akibat konflik Rusia dan Ukraina.

Pemerintah juga diminta melihat perkembangan ekonomi global sehingga mampu menyesuaikan kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dalam negeri.

"Pemerintah sangat *concern* untuk mengendalikan harga. Inflasi 3,08% [harus] dapat dipertahankan sampai secara nasional pada 2023 [inflasi] bisa terkendali," ka-

## PANTANG KENDUR KENDALI INFLASI



### Suku Bunga Acuan & Inflasi Indonesia 2023 (%)

**5,75**  
Rp

JAN  
Inflasi Umum (YoY) **5,58**  
Inflasi Inti (YoY) **3,27**

**5,75**  
Rp

FEB  
Inflasi Umum (YoY) **5,47**  
Inflasi Inti (YoY) **3,09**

**5,75**  
Rp

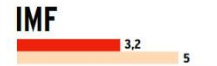
MAR  
Inflasi Umum (YoY) **4,97**  
Inflasi Inti (YoY) **2,94**

APR **5,7** JUN **5,7**  
■ 4,33 ■ 3,52  
■ 2,83 ■ 2,58

MEI **5,7** JUL **5,7**  
■ 4 ■ 3,08  
■ 2,66 ■ 2,43

BISNIS/PINTA NOVIZAH/WIN CAHYONO

### Proyeksi Inflasi & PDB Indonesia 2023 (%)



**Inflasi PDB**  
Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, S&P Global

tanya kepada *Bisnis*, Selasa (1/8).

Sejatinya, risiko yang dapat mengguncang stabilitas inflasi juga tak luput dari perhatian pemerintah. Saat ini, pemangku kebijakan memandangkan stabilitas rupiah menjadi poin krusial.

Maklum, jika rupiah melemah, maka biaya importasi barang makin mahal karena transaksi yang dilakukan oleh dunia usaha dalam aktivitas perdagangan internasional masih menggunakan mata uang Paman Sam.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan kebijakan moneter selanjutnya difokuskan pada upaya untuk memperkuat stabilisasi rupiah di tengah gejolak global yang berlanjut, pengendalian inflasi barang impor, serta memitigasi dampak rambatannya ke stabilitas di dalam negeri.

Kebijakan tersebut di antaranya melalui intervensi di pasar valuta asing dengan transaksi spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian atau penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Kemudian melanjutkan strategi *twist operation* melalui penjualan SBN tenor pendek di pasar sekunder guna meningkatkan daya tarik investor asing.

"Kondisi global sekarang masih tidak menentu, maka suku bunga tetap dulu. Fokus kita ke stabilisasi nilai tukar," kata Perry.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli.

Antara lain melanjutkan belanja bantuan sosial dan subsidi emergi. "APBN akan terus responsif dan adaptif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian," katanya. (Maria Elena/Wi Luh Anggela/Annasa R. Kamalina) E3

Hlm: 1 - Kolom: Halaman Depan

# Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

RABU, 2 AGUSTUS 2023

| PENANAMAN MODAL |

## MALAYSIA SIAP MASUK SEKUPANG

Di tengah evaluasi kawasan ekonomi khusus atau KEK, Badan Pengusahaan Batam justru kian *getol* untuk melegalkan Sekupang sebagai KEK kesehatan. Langkah itu dilakukan dengan mengundang investor untuk menempatkan modalnya di kawasan itu.

redaksi@bisnis.com

**P**asalnya, salah satu syarat dari pemerintah untuk meluluskan kawasan ini sebagai KEK kesehatan adalah menggandeng salah satu brand rumah sakit berskala internasional yang menjadi rujukan masyarakat Indonesia untuk berobat.

Oleh karena itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam menawarkan peluang investasi di Sekupang kepada investor rumah sakit asal Malaysia, KPJ Healthcare Berhad. Bahkan, KPJ Healthcare mengaku siap untuk masuk ke KEK Sekupang setelah melakukan kunjungan ke kawasan itu belum lama ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BP Batam Muhammad Rudi pada Senin (31/7). "Kemarin itu merupakan lanjutan pembahasan mengenai potensi kerja sama dalam pengembangan KEK Kesehatan di Sekupang," katanya.

Dia menjelaskan bahwa salah satu syarat dari pemerintah agar meluluskan usulan KEK Kesehatan Sekupang, yakni harus menjalin kerja sama dengan satu brand rumah sakit internasional yang menduduki 10 besar dunia, atau rumah sakit yang jadi tujuan utama masyarakat Indonesia berobat.

Sebelumnya, BP Batam telah menajaki peluang kerja sama dengan industri kesehatan dari Dubai dan India, tetapi terkendala terkait persyaratan. Sementara untuk KPJ, Rudi optimistis bahwa kerja sama tersebut dapat secara serius ditindaklanjuti.

"Kami mencari *partner* internasional. Dan kelebihan yang kita punya, KEK bisa menghadirkan tenaga medis dari luar negeri. Sehingga masyarakat tidak perlu berobat keluar

negeri. Devisa yang selama ini keluar, itu untuk wilayah kita sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Officer In Charge (OIC) KPJ Healthcare Pn Norhaizam Muhammad mengatakan bahwa peluang kerja sama terbuka cukup lebar antara pihaknya dan BP Batam.

"Peluang sangat bagus, kami percaya Batam ada potensi. Kami juga percaya ada kelebihan yang boleh di-*share*-kan bersama BP Batam. So, insyaallah kami akan kerja sama dan semoga kita bisa wujudkan *hospital* internasional di Batam berjaya," katanya.

Adapun, KPJ Healthcare Berhad merupakan rumah sakit swasta terbesar di Malaysia, yang berpengalaman 42 tahun. Hingga saat ini, KPJ Healthcare telah membuka 29 fasilitas kesehatan rumah sakit di Malaysia, Thailand, Bangladesh dan Australia, termasuk di Jakarta, Indonesia.

Norhaizam menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan relokasi KJP di Jakarta ke daerah baru, yang dianggap potensial dan memiliki fasilitas yang sesuai dengan visi KJP. "Kami punya 30 tahun pengalaman di Jakarta dan 10 tahun di Bangladesh. Di Jakarta kami mendapat kendala terkait izin dokter kami dari Malaysia. Kami berencana pindahkan dari Jakarta ini, bila di Batam bisa, kenapa tidak," jelasnya.

**Bisnis** mencatat rencana pembentukan KEK Kesehatan Sekupang telah memperoleh dukungan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kepulauan Riau (Kepri) Ketua Persi Kepri Sahat H. Siahaan mengungkapkan bahwa pihaknya sangat setuju dengan adanya pembentukan

KEK Internasional Batam yang berlokasi di Sekupang.

Alasannya, dia menilai bahwa KEK Sekupang akan mendorong adanya rumah sakit yang punya kemampuan lebih dalam dari segi pelayanan maupun sumber daya manusianya.

Saat ini, menurutnya, banyak pasien memilih berobat ke negeri jiran, seperti Malaysia dan Singapura karena ahli kesehatan di dua negara tersebut lebih mudah mobilitasinya karena wilayahnya yang tidak terlalu luas seperti Indonesia.

Dengan terbentuknya KEK KIB Sekupang ini, dia berpendapat tenaga ahli kesehatan yang berada di seluruh Indonesia akan ikut bergabung.

Selain itu, imbuhnya, keberadaan KEK KIB Sekupang ini juga bermanfaat untuk menahan devisa negara yang hilang karena perobatan ke luar negeri itu.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menambahkan bahwa dengan dibukanya KEK KIB Sekupang ini, maka akan ada beberapa pasar potensial.

"Beberapa di antaranya, industri farmasi dengan nilai investasi Rp110 triliun dan industri peralatan medis dengan nilai investasi Rp49 triliun," ujarnya.

Batam, imbuhnya, akan menangkap peluang tersebut melalui KEK Kesehatan. "Dengan luas lahan 44,5 hektare dan nilai investasi senilai US\$215 juta, BP Batam akan mengembangkan rumah sakit bertaraf internasional, farmasi, dan peralatan medis, serta akomodasi," jelasnya.

### MINAT INVESTOR LOKAL

Tak hanya Sekupang, KEK Maloy Batuata Trans Kaliman-

tan (MBTK) di Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Kalitim) tengah dilirik oleh investor lokal yakni PT Energi Agro Investama untuk membangun penghiliran minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) di lokasi tersebut.

Investor lokal lainnya yakni PT Palma Serasih Internasional juga telah membenamkan Rp55 miliar untuk membangun *bulk station* CPO di KEK MBTK.

Perjanjian kerja sama antara MBTK dan PT Energi Agro Investama diteken di Kantor Gubernur Kalitim pada Senin (31/7).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalitim Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa Energi Agro Investama merupakan perusahaan yang bergerak di industri penghiliran pengolahan CPO. "Penandatanganan [kerja sama] ini ialah rencana pembangunan *refinery* dan ke depan akan ada biodiesel dengan nilai investasi sebesar Rp 800 miliar," ujarnya di Samarinda, Senin (31/8).

Menurutnya, Energi Agro Investama akan membangun industri pengolahan turunan sawit di KEK MBTK dalam lima tahap. Perusahaan ini juga diklaim sebagai perusahaan pertama yang membangun industri *hilirisasi* CPO di Kalitim, setelah sebelumnya sudah memiliki industri serupa di Sumatra.

"Kami apresiasi ada *tenant* kedua mengisi KEK Maloy. Ini satu prospek yang baik, perusahaan ini juga sudah punya industri yang sama di Sumatra, jadi ini pertama di Kalitim," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur KEK MBTK Ade Himawan menjelaskan bahwa kerja sama tersebut ini merupakan sebuah langkah maju dari upaya bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan

Pengelola untuk mewujudkan penghiliran atau industri *oleochemical* di KEK MBTK.

"Mudah mudahan dengan masuknya PT EAI sebagai pelaku usaha di KEK MBTK bisa meyakinkan para calon investor atau pelaku usaha untuk segera bergabung masuk dan berinvestasi di KEK MBTK," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Riawati menyatakan bahwa salah satu yang menjadi prioritas adalah penghiliran turunan sawit yang memiliki potensi besar.

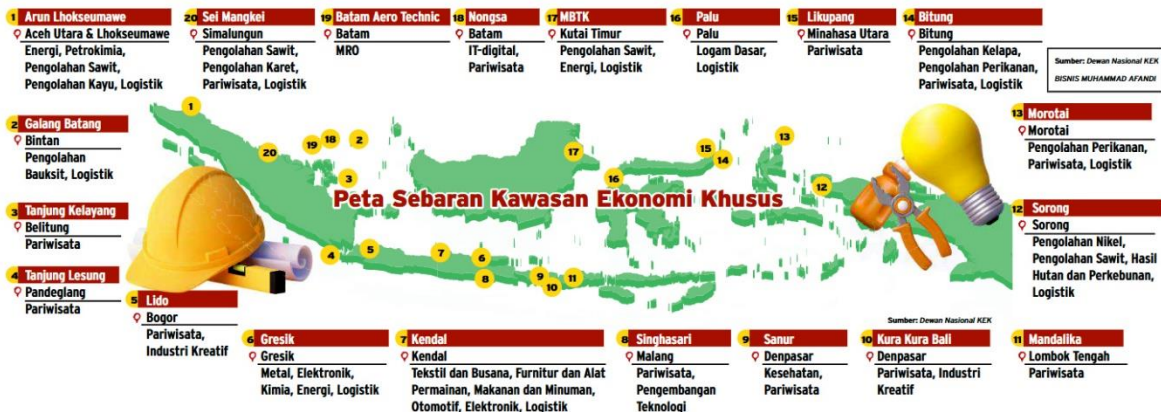
"*Hilirisasi* [penghiliran] sudah sesuai dengan rencana pemerintah provinsi dan masuknya investor baru di KEK MBTK menjadi angin segar bagi keberlanjutan investasi serta dapat mendukung KEK lainnya di Kalitim," ujarnya saat dihubungi **Bisnis**, Selasa (1/8).

Menurutnya, Kalitim saat ini tengah dalam tahap persiapan untuk transformasi ekonomi dari minyak bumi dan gas serta batu bara ke sektor terbuatkan, seperti turunan sawit yang memiliki potensi besar sebagai pengganti batu bara. "Semua pihak harus bersinergi untuk mencapai tujuan *hilirisasi*. Percepatan KEK Maloy menjadi fokus utama saat ini," katanya.

Riawati menambahkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menarik para investor adalah dengan mempromosikan investasi sesuai sektor yang ada dengan kondisi *existing* di Kalitim. "Masuknya investor baru ke KEK MBTK dapat membangun kepercayaan dan menarik investor lain untuk berinvestasi di Kalitim. Keberhasilan ini akan berdampak positif pada KEK dan KI [kawasan industri] lainnya." (IG5/M. Mutawalle Syarwaj) E3



Semangat Juang Sekupang Mengajar Status KEK Kesehatan



# Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

RABU, 2 AGUSTUS 2023

## LAJU RUPIAH MENANTI EFEK DHE

Bisnis, JAKARTA — Pemberlakuan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) mulai bulan ini bisa menjadi penolong untuk kinerja mata uang rupiah yang tengah berada dalam tekanan. Apalagi, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) diprediksi kembali menaikkan suku bunga pada September mendatang.

Ilm Fatimah Timorria  
ilm.fatimah@bisnis.com

**T**ekanan terhadap mata uang rupiah masih terus berlanjut setelah sebelumnya bank sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Di pasar spot rupiah terkoreksi 0,24% atau setara 35,5 poin ke Rp15.115 per dolar AS, Selasa (1/8).

Penurunan ini memang seiring dengan gerak mayoritas mata uang di kawasan Asia. Pelemahan terdapat dialami won Korea Selatan sebesar 0,74%. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat ke 101,97 sampai pukul 18.30 WIB kemarin.

Walaupun begitu, secara *year-to-date*, kinerja rupiah masih jadi yang paling perkasa di Asia dengan apresiasi 3%, diikuti oleh peso Filipina (1,73%), baht Thailand (1,13%), rupee India 0,58%, dan dolar Singapura (0,45%).

Menurut Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, mayoritas mata uang global melemah terhadap dolar AS, seiring dengan menguatnya ekspektasi bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga pada pertemuan September 2023.

"Dolar Amerika Serikat di pasar valas ber-

gerak menguat ke hampir semua mata uang karena kebijakan terbaru The Fed dan terdapat harapan perekonomian akan *soft landing* setelah melalui masa inflasi tinggi," kata David, Selasa (1/8).

Di sisi lain, dia memperkirakan permintaan terhadap dolar AS dari dalam negeri untuk impor cukup meningkat memasuki kuartal III/2023. Secara kumulatif, nilai impor Indonesia selama Januari—Juni 2023 menembus US\$108,73 miliar atau turun 6,42% daripada semester I/2022 sebesar Rp116,18 miliar.

David juga mencatat adanya aliran keluar dana asing di pasar modal, baik untuk pasar obligasi maupun pasar saham sebagai bentuk aksi ambil untung. Nilai dana asing yang keluar dari pasar obligasi mencapai Rp2,6 triliun pada 31 Juli 2023, sementara di pasar saham Rp1,5 triliun.

Kebijakan DHE yang resmi berlaku kemarin, katanya, belum akan berdampak signifikan dalam waktu dekat terhadap nilai tukar rupiah.

Dalam kebijakan tersebut, para eksportir sumber daya alam dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, hingga perikanan wajib menempatkan minimal 30% hasil ekspornya dalam sistem keuangan Indonesia paling singkat selama 3 bulan.

"Perlu dilihat kembali bagaimana kesiapan sektor riil terhadap kebijakan ini. Namun nilai *outstanding*-nya terus meningkat dan sudah sekitar US\$454 juta dan ini bisa terus naik," kata David. Di tengah serangkaian sentimen itu, David memperkirakan rupiah akan bergerak di rentang Rp14.900 sampai dengan Rp15.200 di sisa 2023. Dia menyebutkan perkembangan kebijakan bank sentral Amerika Serikat menjadi salah satu penentu utama

arah rupiah.

Sementara itu, Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi dalam riset hariannya menyebutkan bahwa inflasi Indonesia yang kembali melambat pada Juli menjadi 3,1% *year-on-year* (YoY) disebabkan oleh inflasi harga pangan yang kembali turun tajam menjadi 0,3% YoY.

"Menurut kami, hal ini disebabkan oleh intervensi kebijakan pangan pemerintah di tengah ketidakpastian kapan mulai terjadinya El Niño," tulis Lionel.

Berdasarkan indikator El Niño yang dianalisis Samuel Sekuritas, Indonesia berpotensi menghadapi El Niño yang lemah dengan skenario inflasi harga pangan 1—4% pada akhir tahun.

### SUKU BUNGA

Hal tersebut memberikan kesempatan bagi Bank Indonesia untuk mulai mengendahkan suku bunga 7DRRR sebesar dua kali 25 basis poin pada kuartal IV/2023 menjadi 5,25% demi menekan turun *floor limit* yield INDOGB (obligasi pemerintah) 10 tahun dan 3 tahun.

Saat ini, *yield* dari kedua instrumen tersebut telah menyentuh batas bawah masing-masing, yaitu JIBOR 1M untuk INDOGB 10Y dan 1W untuk 3Y.

"Menurut kami, tindakan ini penting untuk menjaga momentum kelanjutan arus masuk investasi asing ke pasar obligasi. Sehingga, kestabilan nilai tukar rupiah pada semester II/2023 akan lebih

mendatang.

"Namun, kondisi itu dapat terjadi dengan beberapa syarat. Proyeksi tersebut artinya mencakup batas tengah target Bank Indonesia (BI), yaitu di kisaran 2% hingga 4%," katanya dalam riset harian.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada Januari 2023 tercatat berada di posisi 5,28%. Masih tinggi sebagai dampak dari penyesuaian harga BBM pada September 2022.

Pada Februari 2023 inflasi bahkan menunjukkan kenaikan menjadi 5,47% YoY akibat kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,23%.

Menjelang Ramadan atau pada Maret 2023, inflasi justru turun menjadi 4,97% YoY. Sementara itu pada Lebaran atau April 2023, pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan terus melandai ke level 4,33%.

Bahkan pada Mei 2023, inflasi kembali ke posisi 4% atau batas atas target Bank Indonesia. Kemudian pada Juni 2023, inflasi bahkan turun ke posisi 4,52% YoY. Inflasi pangan tercatat terus menurun secara signifikan, sementara komoditas yang masih dominan memberikan andil inflasi adalah beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Adapun pada perdagangan hari ini, Rabu (2/8), Ibrahim memproyeksikan rupiah fluktuatif namun dituntut melemah di rentang Rp15.130—Rp15.200 per dolar AS. ■



Perlu dilihat kembali bagaimana kesiapan sektor riil terhadap kebijakan ini.



### Kinerja Mata Uang Asia Year to Date (ytd)





Rabu, 2 Agustus 2023

## Menbidik RPPN 2025-2045: Perspektif Ekonomi

ganga proses pemulihan dan perjalanan ekonomi untuk 20 tahun ke depan.

Entropi ekonomi telah berdampak pada sulitnya perekonomian Indonesia keluar dalam jebakan pendapatan kelas menengah atau *middle income trap* (Pakkanna, 2022). Situasi ini pun terkonfirmasi, ekonomi Indonesia sulit naik ke status negara dengan pendapatan tinggi. Selain itu, berdampak pada naiknya angka *incremental capital output ratio* (ICOR). Angka ICOR Indonesia masih bertengger tinggi mendekati 7%, sementara rerata negara ASEAN hanya 3,5%. Tingginya angka ini mengirip pesan, masih rendahnya produktivitas, rendahnya daya saing, efisiensi, dan banyaknya biaya siluman meropeo mesin birokrasi ekonomi.

Mengkonfirmasi data Badan Pusat Statistik (BPS), besarnya aktivitas kebocoran anggaran dan menjadi faktor penghambat investasi di Indonesia. Bahkan TII, senjak 1995 hingga saat ini, telah menurunkan indeks persepsi korupsi (IPK), yakni peringkat negara-negara di dunia berdasarkan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. Indonesia masih berada pada posisi yang sangat memprihatinkan.

menunjukkan energi bangsa banyak terendap. Artinya, banyak kebocoran anggaran di Tanah Air tidak dijadikan problem pokok untuk dijadikan solusi dalam draft RPN ini.

### Deindustrialisasi

Selanjutnya, kami juga menyoroti tentang deindustrialisasi. Data membuktikan bahwa ekonomi Indonesia selalu ditopang usaha ekstraktif berbasis sumber daya alam, bukan ditopang kekuatan pengetahuan dan teknologi. Dalam kasus ekspor nilai pada 2022, misalnya, ekspornya surplus hingga US\$291,88 miliar atau ekuivalen Rp4.524 triliun. Begitu pula barutabara, CPO, dan lainnya. Ihwal ini relevan jika melihat kontribusi *total factor productivity* (TFP) dalam perekonomian yang rendah jika dibandingkan dengan banyak negara lain.

Indikator TFP digunakan untuk mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara dan kemajuan teknologi. Menurut BPS (2023), jika dilihat sejak 2010, TFP Indonesia terus turun bebas. Jadi, penggunaan otot semakin dominan. Dengan demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2000-2020 rata-rata 71% ditopang modal yang berbasis non-IT. Sumbangan dari tenaga kerja mencapai 45%, sedangkan sumbangan modal yang berbasis IT hanya 4%. Adapun kontribusi TFP terhadap pertumbuhan justru minus 13%.

Rendahnya TFP juga sejalan dengan gejala deindustrialisasi di Indonesia yang ditunjukkan dengan menurunnya kontribusi manufaktur terhadap PDB. Gejala deindustrialisasi ini pun terlihat dari rendahnya kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor. Mengutip data *World Development Indicators* yang dirilis Bank Dunia, total ekspor manufaktur terhadap ekspor Indonesia hanya 44,9% pada 2021.

Deindustrialisasi adalah proses kebalikan dari industrialisasi, yakni penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengolahan nonmigas terhadap PDB. Selain kinerja manufaktur, sinyal deindustrialisasi juga bisa dibaca dengan semakin besarnya porsi pekerja informal dalam struktur pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan karena penyerapan kerja di sektor informal meningkat. Namun, sumbangan sektor industri terhadap PDB malah mengalami penurunan. Kemudian angka pengangguran turun. Penciptaan lapangan kerjanya makin tidak bermutu karena yang meningkat itu di sektor pekerja informal.

Oleh karena itu, dalam RPPN 2025-2045 seyogyanya harus dipertimbangkan kembali sistem insentif yang ditujukan untuk memperbaiki sektor manufaktur demi menciptakan insentif yang lebih baik, terutama yang berskala kecil menjadi entitas baru yang tinggi penyerapan tenaga kerjanya dan lebih kompleks produknya. Perlu diversifikasi manufaktur dan menaikkan levelnya agar mampu menjadi bagian dari *global value chain* (GVC). Saat ini, perusahaan Indonesia yang berpartisipasi di GVC kebanyakan hanya menjadi *supplier* bahan mentah dan sumber daya alam, dan secara umum produknya memiliki tingkat kompleksitas rendah. Ini terkait dengan sifat alami perekonomian Indonesia yang masih bergantung pada sumber daya alam (ekstraktif).

Salah satu kunci membangun reindustrialisasi ialah dengan mendorong inovasi dan penguasaan teknologi. Hal itu mengingat Indonesia tidak lagi dapat bergantung pada *low-skilled labour* untuk mendorong industri di tengah tingginya kompetisi tenaga kerja murah dari negara-negara berkembang lainnya. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mencari pendorong industri yang *cutting-edge* salah satunya dengan peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi.

### Lemahnya kelas menengah

Selanjutnya, kami juga menyoroti lemahnya keberadaan kelas menengah di Indonesia. Belajar dari sejarah renaissans di Eropa dan Revolusi Prancis, kelas menengah yang jumlahnya sangat besar serta memiliki sikap independen dan kritis pada gilirannya mam-

pu membuat transformasi masyarakatnya menjadi makmur dan egaliter. Sayangnya, kelas menengah di Indonesia belum terbentuk.

Di Indonesia, ada sejumlah orang kaya dari kalangan swasta, tetapi umumnya dibalaskan oleh kepengusahaannya yang tidak berakut *entrepreneur*, dan lebih karena fasilitas dan 'kronisme'. Golongan ini pun jumlahnya hanya sekitar 0,008% dari jumlah penduduk yang sekitar 65 juta. Kontribusi kelas menengah Indonesia memang telah terlihat dari tingkat konsumsi domestik yang tinggi. Namun, apabila dinilai dari tingkat kepemilikan tabungan nasional, kelas menengah Indonesia hanya berkontribusi 32% dari PDB. Jumlah ini paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain.

Gambarnya perilaku dan gaya hidup (*life style*) kelas menengah Indonesia masih cenderung konsumtif, bukan produktif. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu lama, posisi mereka akan rentan mengalami kejatuhan. Padahal, kelompok kelas menengah dapat menjadi katalisator dan eskalator pembangunan ekonomi bangsa. Di samping itu, tingkat pendidikan mereka yang relatif lebih baik dan modal finansial yang dimiliki semestinya dapat mendorong percepatan penanaman angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia.

### Lemahnya ketahanan pangan

Kemudahan kami juga menyoroti lemahnya ketahanan pangan. Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Artinya, mayoritas tenaga kerja merupakan pekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data BPS, jumlah masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2022 sebanyak 40,59 juta orang atau 29,36% dari total pekerja.

Kendati memiliki tenaga kerja terbanyak kerimbang sektor lain, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB sangat rendah. Pertumbuhannya pun menjadi salah satu yang terendah. Data BPS menunjukkan sumbangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 12,4%. Dengan mayoritas pekerja berada di sektor pertanian, pertumbuhan yang rendah tentu berdampak pada kesejahteraan yang rendah. Hal ini tentunya berdampak pada belanja rumah tangga petani yang juga rendah. Akibat pertumbuhan ekonomi pun sulit tinggi.

Dalam konteks ketahanan pangan ini, terlihat dalam RPPN 2025-2045 tidak ada program pemberian lahan, modal, dan peralatan kepada sarjana pertanian, peternakan, dan ilmu-ilmu pertanian.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, pasar domestik potensial, dan potensi alam yang luar biasa. Bahkan, konsumsi domestik Indonesia lebih kokoh karena dalam kisaran 56,8% dari PDB. Indonesia juga memiliki pengalangan keragaman sosial-budaya. Tentu, Indonesia memerlukan usaha dan industri-industri kecil yang berorientasi ekspor berbasis pangan. Namun, jangan biarkan mereka bertengger di pinggiran pasar global yang suksesnya Tiongkok menjadi pasar dunia, selain karena spirit heroisme dan nasionalisme rakyatnya terhadap produk-produk dalam negeri, terutama produk pangannya, juga lantaran kemampuan penerus produknya di pasar global.

Oleh sebab itu, dalam RPPN 2025-2045 perlu milestone tentang dukungan kebijakan proteksi produk dalam negeri yang berorientasi *ouput*. Lemahnya kebijakan proteksi memunculkan produk Tiongkok yang murah yang telah diproduksi di negerinya. Selain menyempatkan industri mikro yang berorientasi ekspor, perlu pula mengukuhkan ekonomi lokal (domestikasi). Domestikasi ekonomi diartikan upaya mempekokok kekuatan dan kohesivitas ekonomi di atas sendi-sendi industri nasional. Karena itu, potensi ekonomi lokal yang berbaratan di sentroter negeri harus dipupuk kembali untuk bawahi dalam menjamu pasar domestik (konsumsi domestik) dan menjamu pasar global (orientasi ekspor). Semoga!

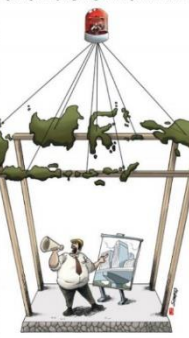
Dalam konteks ekonomi Pancasila, pentingnya kebijakan ekonomi didasarkan pada nilai-nilai kerahatan (etikal/moralitas), kemanusiaan, persatuan (nasionalisme), demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Tujuan ekonomi Pancasila sejatinya mewujudkan dan menegakkan keadilan sosial. Dalam draft RPPN 2025-2045 dan dalam setiap kebijakan-kebijakan ekonomi nasional seyogyanya dicantumkan dan diarahkan pada terciptanya keadilan ekonomi. Tingkat pada Bung Hatta (1975), yang jauh hari telah memberikan pesan bahwa keadilan hanya bisa tegak di atas keadilan sosial. Sementara untuk ekonomi konstitusi didasarkan pada klausul dalam UUD 1945. Banyak pasal yang harus dijadikan landasan dalam RPPN 2025-2045 ini. Di negara mana pun, konstitusi ekonomi merupakan perangkat peraturan tertinggi yang menjadi dasar setiap kebijakan ekonomi. Konstitusi ekonomi mengatur sejak soal penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, hak milik perorangan, hingga peran negara dan perusahaan negara dalam kegiatan usaha.

Dalam Pasal 33 UUD 1945, misalnya, kebijakan ekonomi harus 'disonor' sesuai makna demokrasi ekonomi. Negara harus menyusun dan mendasar sistem kelembagaan. Wujud 'ketertusutan' ialah sebagai usaha bersama berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan. Karena itu, sangat tepat jika 'ketertusutan' ekonomi tidak diserahkan pada liberalisasi pasar yang rakus, yang melahirkan penindasan, eksploitasi, dan penghancuran alam, tapi harus sengaja didesain (Swasono, 2010). Tentu, instrumen operasionalnya ialah koperasi. Koperasi, menurut Bung Hatta, memberikan tempat yang sama antara kaya dan miskin untuk saling berkerja sama. Hatta (1981), memperingkan agar dalam koperasi, mereka yang miskin harus dibela dan diberi kesempatan.

Sayang sekali, dalam draft RPPN ini 'pelit' diluas tentang makna koperasi itu. Bahkan, di setiap perubahan rezim pemerintahan pun, nasib koperasi tetap sama. Maka, andai pemerintah ingin mengembangkan koperasi menjadi soko guru ekonomi ke depan, harusnya pelbagai masalah yang menghambat perkembangan koperasi itu diantisipasi.

Dalam UU BUMN, misalnya, sangat jelas mendiskreditkan koperasi. Semua BUMN diwajibkan menjadi perseroan. Semua kebijakan secara penuh dibuat berada dalam kuasa presiden dan menteri BUMN. Coba andaikan dibalik, semua BUMN itu dikorporasikan, maka rakyat akan turut memiliki dan menikmati manfaatnya langsung dari aset BUMN yang besarnya Rp10.700 triliun. Koperasi di Amerika yang kita tubuh kapulnis saja diberikan porsi besar untuk mengelola ekonomi negara (Suroto, 2023).

**Kebocoran anggaran**  
Sesu hal yang juga kami soroti ialah tentang kebocoran anggaran dalam pelbagai persona indikator ekonomi makro yang digabungkan pada draft RPPN 2025-2045 ini, misalnya indikator PMI (*purchasing managers index*). Indeks daya beli, investasi langsung, neraca pembayaran, dan lainnya terlihat berjalan positif. Namun, satu hal yang selalu menggejutkan ialah ekonomi Indonesia dan kurang disentuh dalam draft RPPN 2025-2045 ini ialah penyakit entropi ekonomi. Adanya entropi biaya tinggi, masih besarnya pungutan retribusi/retribusi, korupsi makin mengganang dan masif, kebocoran anggaran negara, ekonomi rente, dan seterusnya merupakan bagian entropi itu. Penyakit ini selalu meng-



Demikian pula tingginya ekonomi bayangan (*shadow economy*). Ekonomi bayangan mencakup semua aktivitas ekonomi yang dapat dikenai pajak bila aktivitas-aktivitas tersebut tercatat di notaris pajak. Tergerusnya penerimaan dari setoran pajak industri sawit Indonesia, misalnya, menjadi kasus yang aneh tapi nyata. Padahal komoditas itu selalu menyumbang devisa terbesar di tengah harga internasional yang membaik. Bahkan, luasan areal dan produksi buah tandan segar sawit meningkat. Tapi pada faktanya, riset Tempo, Mougaboy, Betulita, dan Auriga Nusantara menemukan kejanggalan.

Penerimaan pajak terus-menerus merosot dari Rp21,17 triliun (GDI) selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya hanya rerata Rp15 triliun (2020). Menurut riset tersebut, banyak pelaku usaha tidak melaporkan pajaknya dan terjadi pengalangan pajak. Tentu, kasus sejenis setali tiga uang pada industri ekstraktif, misalnya batu bara, emas, nikel, tembaga, dan lainnya.

Pada Mei 2016, Menteri Keuangan (Menteri Bambang S Brodjonegoro pernah mengungkapkan angka Rp1.400 triliun uang warga negara Indonesia (WNI) yang diparkir di luar negeri. Potensi uang sebanyak itu merupakan kekayaan dari para pemain lama yang sudah bertahun-tahun menyimpan uang di luar negeri. Demikian pula pada kasus Pandora Papers dan Panama Papers,

**M**AJELIS Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Ditilibang) TP Muhammadiyah selama Juli 2022 mengelar kelompok diskusi terumpun (FGD) untuk mengkritisi dan pengayaan draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPPN) 2025-2045 yang telah disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI. Dalam FGD ini dibagi 6 cakupan pembahasan.

Sebagai koordinator komisi ekonomi, kami mengulas titik tekan pada milestone proyeksi dan kebijakan ekonomi dengan pelbagai implikasinya hingga menuju Indonesia Emas 2045. Tentu, RPPN ini merupakan kelanjutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPPN 2005-2025.

Dalam ulasan ini, kami ingin mengkritisi lebih awal tentang visi RPPN 2025-2045, yakni Negara Nusantara, bertual, maju, dan berkelanjutan. Visi itu mengalami deviasi dan distorsi jika merujuk pada visi dan misi abadi Negara Kesatuan RI, yakni Negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang dimaksud di sini adalah NKRI yang secara teritorial memiliki penguasaan internasional sebagai negara yang merdeka serta memiliki pemerintahan, kepala negara, konstitusi, dan kebijakan negara.

Sebagai negara kesatuan, maka kebijakan ekonomi ditangani oleh pemerintah. Sementara negara Nusantara, entitasnya abstrak dan melampaui entitas negara. Pertanyaannya, apakah dalam milestone 2035-2039 (tahap ketiga), Indonesia akan melakukan ekspansi global, menganeaksi kembali Nusantara (terutama negara-negara jiran di kawasan ASEAN)?

Selanjutnya, visi abadi Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni Menjadi Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam kaitan pembangunan ekonomi ke depan, visi itu seharusnya menjadi imajinasi yang bisa dikonkretkan dalam konstitusi atau setiap regulasi turumannya.

Pembangunan sejatinya merupakan suatu proses perubahan bertahap dan simultan menuju arah yang lebih baik demi mencapai tujuan, mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Dalam implementasi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu, maka setiap tarikan napsu kebijakan ekonomi Indonesia merujuk pada ekonomi berbasiskan nilai-nilai Pancasila (ekonomi Pancasila) dan ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai UUD 1945 (ekonomi konstitusi).

## Anggaran Subsidi Energi Berpotensi Membengkak

Konsumsi elpiji 3 kg, BBM maupun listrik subsidi per akhir Mei naik dibanding tahun lalu

Siti Masitoh,  
Arfyana Citra Rahayu

JAKARTA. Pemerintah harus mengelola fiskal ke depan secara lebih ketat. Pasalnya, anggaran subsidi hingga akhir tahun nanti berpotensi membengkak dan melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Konsumsi energi bersubsidi juga berpotensi jebol. Ambil contoh penggunaan elpiji tabung 3 kilo gram (kg). Mengacu ke hitungan PT Pertamina Patra Niaga, kuota elpiji subsidi sepanjang tahun ini akan mencapai 8,2 juta metrik ton, lebih tinggi daripada kuota tahun ini sebesar 8 juta ton.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), konsumsi gas melon per akhir Mei 2023 mencapai 3,3 juta ton, tumbuh 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertamina menghitung, dengan kuota elpiji 8 juta ton, anggarannya hanya Rp 85,45 triliun. Angka itu lebih rendah dari alokasi APBN 2023 yang sebesar Rp 117 triliun.

Karena itu, dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi

VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pertengahan Juni lalu, manajemen Pertamina Patra Niaga mengusulkan selisih nilai subsidi Rp 32,4 triliun dari alokasi awal untuk menambah volume subsidi elpiji 3 kg yang akan lebih 2,7% menjadi 8,2 juta ton tersebut.

Nah, elpiji subsidi, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik subsidi juga berpotensi jebol. Pasalnya, berdasarkan data Kemkeu pula, realisasi BBM maupun listrik subsidi meningkat.

Realisasi pemakaian BBM subsidi per akhir Mei mencapai 7.169,4 ribu kiloliter (kl), naik 1,8% year on year (yoy). Sementara realisasi listrik bersubsidi sebesar 39,2 juta pelanggan, naik 2% yoy.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Wahyu Utomo tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait perhitungan anggaran subsidi energi hingga akhir tahun ini.

Selain dipengaruhi konsumsi, anggaran subsidi energi juga dipengaruhi dua indika-

tor lainnya. *Pertama*, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memperkirakan rerata ICP tahun ini berkisar US\$ 75 hingga US\$ 80 per barel, jauh di bawah asumsi APBN yang sebesar US\$ 90 per barel.

**Agar kuota tak jebol, peredaran elpiji bersubsidi harus dikendalikan.**

*Kedua*, nilai tukar rupiah. Kemkeu memperkirakan rerata kurs rupiah 2023 di kisaran Rp 15.000-Rp 15.250 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah dari asumsi senilai Rp 14.800 per dolar AS. Ini yang juga perlu diwaspadai.

### Upaya pengendalian

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa bilang,

saat ini pemerintah masih tertolong oleh stabilnya harga minyak dan rendahnya harga gas. Namun, "Kalau volume elpiji 3 kg naik, subsidi pasti naik juga," kata dia, kemarin.

Fabby juga bilang, selama peredaran subsidi elpiji tidak dibatasi dan adanya perbedaan harga yang signifikan antara elpiji subsidi dan nonsubsidi, maka kuota elpiji subsidi

akan jebol. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengendalikan peredaran elpiji subsidi.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan pemerintah bahwa konsumsi energi akhir tahun bisa jebol seiring momentum Natal dan Tahun Baru, juga aktivitas produksi barang dan jasa menjelang tahun politik 2024.

### Realisasi Anggaran Subsidi Energi dan Kompensasi Energi Semester I-2023 (Rp triliun)

Tahun	Subsidi Energi	Kompensasi
2019	56,19	0
2020	48,3	7,4
2021	59,54	0
2022	75,59	104,8
2023	67,1	66,1

### Pemanfaatan Subsidi Energi per Akhir Mei

Uraian	2022 Realisasi	2023 Realisasi	Growth (% yoy)
BBM (ribu kiloliter)	7.040,8	7.169,4	1,8
Elpiji tabung 3 kilogram (juta meterik ton)	3,2	3,3	5,4
Listrik bersubsidi (juta pelanggan)	38,5	39,2	2,0

Sumber: Kementerian Keuangan